

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penyajian temuan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

##### **4.1.1 Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah**

Dalam penelitian penulis mengamati 3 tahapan pengan langsung Barang/Jasa. Tahapan tersebut meliputi penyusunan Rencana Umum Pengadaan, Penetapan Penyedia, dan penetapan dan pelaksanaan kontrak, tahapan tahapan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

##### **1. Rencana Umum Pengadaan**

Tahap awal dalam prosedur pengadaan langsung barang atau jasa adalah Rencana Umum Pengadaan. Rencana Umum Pengadaan adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang di biyai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I). Dalam Rencana Umum Pengadaan terdapat 2 tahap yaitu : penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan, di Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah sudah sesuai dengan regulasi namun masih terdapat kendala yaitu ketidakpahaman pegawai saat pengimnputan data

Rencana Umum Pengadaan, serta kurangnya pegawai yang mempunyai kompeten dalam pengadaan.

## **2. Pemilihan dan Penetapan Penyedia**

Pemilihan penyedia barang/jasa adalah pemilihan dari dua badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultas/Jasa Lainnya. (Perpres No.54 Tahun 2010). Dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdapat proses pemilihan, Proses tersebut meliputi: penetapan HPS, perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa, di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan, namun masih ada kendala yaitu tidak ada tempat khusus penyimpanan dokumen pengadaan sehingga mempersulit saat dokumen tersebut akan dibutuhkan.

## **3. Penetapan dan Pelaksanaan Kontrak**

Penetapan dan pelaksanaan kontrak dilakukan oleh PPK, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan surat penunjukan penyedia jasa/barang. PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan :

1. Bukti pembelian dapat digunakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

2. Kuitansi dapat digunakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
3. SPK dapat digunakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Proses pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan Regulasi Pemerintah namun terjadikendala yaitu keterlambatan pelaksanaan kontrak.

#### **4.1.2 Kendala Pengadaan barang dan jasa di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah**

Banyak permasalahan seputar pengadaan langsungBarang/Jasa di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah khususnya mengenai pemasukan data Rencana Umum Pengadaan. Salah satunya yaitu kurangnya Pejabat Pembuat Komitmen.

##### **1. Kendala Umum Pengadaan**

Mengenai kendala Rencana Umum Pengadaan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sama dengan kendala pada umumnya di instansi lain salah satunya adalah kurangnya kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selain itu rumitnya pengisian form RUP menjadi kendala dalam pengadaan langsung Barang/Jasa.

## **2. Kendala Pemilihan dan Penetapan Penyedia**

Kendala dalam penetapan dan pemilihan penyedia Barang/Jasa adalah terkadang pihak penyedia tidak memasukan dokumen penawaran, jadi dari pihak panitia harus meminta dokumen penawaran. Selain itu tempat khusus untuk menyusun dokumen tidak ada sehingga mempersulit saat pencarian.

## **3. Kendala Penetapan dan Pelaksanaan Kontrak**

Kendala yang terjadi saat pelaksanaan kontrak dan penetapan kontrak adalah kita tidak bisa melaksanakan kontrak secara dadakan jika ada pengadaan dadakan

## **4.2 Saran**

Berdasarkan pemaparan kesimpulan yang penulis jelaskan di atas, maka dapat di ambil saran sebagai berikut :

### **1. Rencana Umum Pengadaan**

Untuk mengatasi kendala yang terjadi pada pengadaan langsung di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan memperbaiki pedoman RUP dengan tahapan antara lain, adanya kejelasan tanggung jawab. Yang menginput RUP adalah yang memiliki RUP sehingga peran LPSE hanya sebagai helpdesk jika ada kurang pahaman. Melakukan pelatihan terhadap pegawai lain sehingga panitia pengadaan Barang/Jasa akan bertambah dan memudahkan saat input RUP.

## **2. Pemilihan dan Penetapan Penyedia**

Dalam tahapan ini kendala yang terjadi adalah tidak ada tempat khusus untuk menyimpan dokumen pengadaan sehingga dokumen disimpan di sub-sub bagian masing-masing dan berantakan sehingga mempersulit saat pencarian. Untuk mengatasi masalah ini penulis menyarankan agar Dinas Sosial memiliki ruangan atau tempat tersendiri untuk menyimpan dokumen pengadaan sehingga akan mempermudah ketika dokumen tersebut dibutuhkan.

## **3. Penetapan dan Pelaksanaan Kontrak**

Kendala dalam penetapan dan pelaksanaan kontrak adalah tidak dapat melaksanakan pengadaan secara dadakan, sebenarnya sudah ada solusinya dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang atau jasa yang berlaku sebagai salah satu metode pengadaan barang jasa oleh Pemerintah Indonesia. Penunjukan langsung ini bukan metode yang umum, dan dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dan atau apabila pengadaan barang/jasa bersifat khusus. Penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang satu penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan

pekerjaan dan/atau memiliki kualifikasi. Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung terhadap penyedia barang/jasa meliputi perencanaan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan harus segera/tidak dapat ditunda untuk pertahanan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera.